Peran Kelompok Sadar Wisata sebagai Agen Pendidikan Nonformal dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Wisata: Studi Kasus SARUGO, Sumatera Barat

Muhamad Fahrur Rozi*, Prehaning Yuni Astuti, Achmad Baidhowi, Zulkarnain

Universitas Negeri Malang, Jl. Semarang No. 5, Malang, Indonesia

*Corresponding author, email: muhamad.fahrur.2601419@students.um.ac.id

https://doi.org/10.17977/2549-7774.006840

Article history

Submitted: 05 Juni 2026
Revised: 22 Juni 2026
Accepted: 17 Juli 2026
Published: 22 Agustus 2026

Keywords

Pemberdayaan Masyarakat
Pembelajaran Masyarakat
Pendidikan Nonformal
Pokdarwis
Desa Wisata

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai agen pendidikan nonformal dalam pemberdayaan masyarakat SARUGO. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi kasus kualitatif yang dilaksanakan di Jorong Sungai Dadok, Nagari Koto Tinggi, Sumatera Barat. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen. Sebelas informan dipilih secara purposif dari unsur pemerintah nagari, Pokdarwis, pemimpin adat dan agama, pemuda, serta pelaku usaha pariwisata. Analisis data mencakup reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan dengan triangulasi sumber dan metode. Hasil analisis dalam penelitian ini menempatkan pembelajaran berlangsung melalui pendampingan eksternal dalam pembentukan Pokdarwis, diskusi antarteman sebaya, perencanaan kolektif, dan praktik kegiatan pariwisata. Pokdarwis menghubungkan pengetahuan serta keterampilan lokal dengan tugas pemanduan, pengelolaan pondok wisata, kesenian, agrowisata, kuliner, dan promosi. Proses ini melibatkan perguruan tinggi, pemuda, pemimpin masyarakat, dan pemerintah setempat. Data menunjukkan perlunya musyawarah yang lebih inklusif dengan pemimpin adat. kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pokdarwis menjadi perantara pembelajaran masyarakat dengan mengorganisasi kesempatan untuk belajar, berpraktik, dan berkoordinasi. Peran pendidikannya terwujud melalui partisipasi dan praktik lokal, bukan kurikulum formal. Pendidikan nonformal di desa wisata perlu bertumpu pada pengetahuan lokal dan mendukung pengambilan keputusan yang inklusif.

1. Pendahuluan

Desa wisata menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenali potensi lokal, mengoordinasikan layanan, berkomunikasi dengan pengunjung, serta menjaga sumber daya budaya dan lingkungan. Tanggung jawab tersebut tidak cukup ditopang oleh infrastruktur pariwisata. Warga juga memerlukan kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan praktis, kepercayaan diri, dan kapasitas kolektif. Karena itu, pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu perhatian utama dalam pengembangan desa wisata di Indonesia, meskipun pelaksanaan dan pemerataan manfaatnya berbeda-beda di setiap wilayah (Dushkova & Ivlieva, 2024)

Proses pengembangan kapasitas tersebut dapat dipahami melalui pendidikan nonformal dan pendidikan masyarakat. Pembelajaran di tengah masyarakat dapat berlangsung melalui lokakarya terencana, pendampingan, pertemuan, pertukaran pengalaman antarteman sebaya, dan praktik dalam situasi kerja nyata. Pembelajaran semacam ini relevan terutama ketika lembaga pelatihan formal sulit dijangkau atau ketika pengetahuan berkaitan erat dengan mata pencaharian dan praktik budaya setempat. Sejumlah penelitian mengenai pendampingan desa wisata di Indonesia menekankan perencanaan partisipatif, pengembangan kapasitas, pengalaman lokal, dan kolaborasi sebagai unsur penting pendidikan masyarakat (Achmad, 2023).

Pendidikan nonformal memberi kerangka yang sesuai untuk membaca pembelajaran semacam ini karena prosesnya dapat disusun menurut kebutuhan warga, berlangsung di luar jalur persekolahan, dan terhubung langsung dengan kehidupan sehari-hari. Dalam konteks desa wisata, belajar tidak selalu hadir sebagai kursus dengan kurikulum dan sertifikat. Pertemuan kelompok, pendampingan, pembagian tugas, latihan menerima pengunjung, dan evaluasi kegiatan dapat menjadi pengalaman belajar ketika peserta memperoleh kesempatan untuk mencoba,

© 2026 The Author(s)
This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
ISSN: 2549-7774

berdiskusi, dan menggunakan pengetahuan dalam situasi nyata. Kajian tentang pendidikan masyarakat dan pengembangan desa wisata juga menempatkan pendampingan serta partisipasi sebagai unsur penguatan kapasitas lokal (Andriani, 2021).

Namun, tidak setiap aktivitas organisasi dengan sendirinya dapat disebut pendidikan. Pokdarwis menjalankan fungsi pendidikan ketika kelompok menyediakan ruang untuk bertukar pengetahuan, membantu anggota memahami tugas, menghubungkan warga dengan sumber belajar, serta memberi kesempatan menerapkan keterampilan. Dengan sudut pandang ini, pertanyaan penelitian bukan hanya apakah Pokdarwis berhasil mengembangkan destinasi, melainkan bagaimana proses pembelajaran muncul dalam kegiatan organisasi dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Peran Pokdarwis sebagai motivator, komunikator, fasilitator, dan penghubung yang dibahas dalam penelitian terdahulu dapat dilihat sebagai pintu masuk untuk menelaah fungsi belajar tersebut (Putrawan & Ardana, 2019)

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dapat menjadi wadah kelembagaan bagi proses pembelajaran tersebut. Selain mempromosikan destinasi, Pokdarwis dapat mempertemukan warga, membagi tanggung jawab, menghubungkan masyarakat dengan pendamping dari luar, serta membuka kesempatan belajar melalui pelaksanaan kegiatan pariwisata. Penelitian tentang Pokdarwis telah mengkaji perannya dalam partisipasi masyarakat, komunikasi, pengelolaan destinasi, dan pengembangan kapasitas lokal (Putrawan & Ardana, 2019; Rozi, 2023; Simanjuntak & Sunarja, 2023; Wahyuhana, 2021; Wahyuni, 2023). Penelitian terdahulu di SARUGO berfokus pada peran Pokdarwis dalam mengembangkan potensi wisata alam (Rozi, 2023) Artikel ini mengarahkan perhatian pada proses pendidikan yang tampak dalam kasus tersebut, termasuk pendampingan, pembelajaran antarteman sebaya, dan pembelajaran melalui praktik.

Pemberdayaan masyarakat dalam kajian ini dipahami sebagai proses yang memperluas kemampuan warga untuk mengenali potensi, menyusun prioritas bersama, mengambil peran, dan terlibat dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan setempat. Karena itu, pemberdayaan tidak disamakan dengan kenaikan pendapatan atau bertambahnya jumlah kunjungan wisatawan. Dimensi sosial dan kelembagaan—seperti keterlibatan dalam perencanaan, akses terhadap informasi, pembagian tanggung jawab, serta pengakuan terhadap pengetahuan lokal—juga perlu diperhatikan. Sejumlah kajian pemberdayaan pariwisata menegaskan pentingnya partisipasi, kapasitas lokal, dan relasi kemitraan dalam menilai proses pemberdayaan (Kurniawan & Cahyono, 2020).

Kesenjangan kajian ini penting karena pemberdayaan tidak hanya berarti peningkatan kegiatan ekonomi. Pemberdayaan juga mencakup kesempatan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, daya bertindak, dan kapasitas kolektif agar dapat terlibat dalam pengambilan keputusan serta memperjuangkan prioritas lokal. Penelitian terkini menjelaskan pemberdayaan dalam konteks pariwisata melalui dimensi sosial, psikologis, ekonomi, dan politik (Kurniawati, 2021). Pendidikan berbasis masyarakat menambahkan sudut pandang proses dengan menelaah siapa yang belajar, apa yang dipelajari, bagaimana pembelajaran diselenggarakan, dan apakah pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan dalam kegiatan kolektif.

SARUGO (Desa Wisata Seribu Gonjong) di Jorong Sungai Dadok, Nagari Koto Tinggi, Sumatera Barat, merupakan kasus yang relevan untuk dikaji. Masyarakat mengembangkan wisata alam dan budaya dengan bertumpu pada sumber daya lokal serta tradisi Minangkabau. Data lapangan mencatat pembentukan Pokdarwis pada 2019, pendampingan oleh perguruan tinggi dan mahasiswa, diskusi pemuda, pembagian kelompok kerja berdasarkan bidang, serta keterlibatan pemimpin adat dan agama. Data tersebut memungkinkan artikel ini mengkaji dimensi pendidikan dalam proses pemberdayaan masyarakat, bukan menilai kinerja pariwisata (Hariyadi, 2024).

Konteks budaya Minangkabau membuat proses tersebut perlu dibaca bersama tata hubungan sosial setempat. Pengetahuan tentang adat, peran ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai, serta forum musyawarah tidak hanya menjadi isi yang dapat diperkenalkan kepada pengunjung. Pengetahuan dan kewenangan itu juga memengaruhi cara masyarakat menyepakati kegiatan, menjaga batas kepantasan, dan menentukan pihak yang berhak terlibat. Oleh sebab itu, pembelajaran yang mendukung pemberdayaan perlu memberi ruang bagi pemuda dan pengelola wisata sekaligus menghormati mekanisme pengambilan keputusan adat.

Sebagai desa wisata adat, SARUGO menggabungkan rumah gadang berderet dengan sumber daya alam dan kegiatan budaya. Paket yang disiapkan mencakup pertunjukan tari gelombang, talempong, dan musik bambu; kunjungan ke sungai, air terjun, dan gua; serta kegiatan memetik jeruk dan pengenalan sejarah adat. Ragam tersebut menuntut koordinasi antara pengelola, pemuda, pemilik sumber daya, dan pemangku adat. Keragaman potensi itu

© 2026 The Author(s)
This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
ISSN: 2549-7774

sekaligus menyediakan konteks belajar yang nyata: anggota perlu memahami potensi, menyusun pengalaman wisata, dan memastikan penyajiannya menghormati norma masyarakat.

Dengan demikian, fokus pendidikan nonformal membantu menjelaskan dimensi pemberdayaan yang kurang terlihat apabila analisis hanya diarahkan pada promosi destinasi atau manfaat ekonomi. Artikel ini menelaah bentuk kesempatan belajar yang muncul, hubungan antara pengalaman lokal dan pendampingan perguruan tinggi, serta kondisi sosial yang memengaruhi partisipasi. Fokus tersebut merupakan pembacaan pendidikan atas data kasus SARUGO yang juga pernah dibahas dari sisi pengembangan potensi wisata alam (Jannah, 2022). Karena menggunakan konteks dan data kasus yang beririsan dengan publikasi tersebut, artikel ini perlu menegaskan kontribusi analitisnya pada proses pembelajaran dan tidak mengulang klaim atau kesimpulan publikasi terdahulu.

Kesenjangan khusus yang dikaji adalah masih terbatasnya penjelasan tentang cara Pokdarwis memfasilitasi pembelajaran masyarakat di desa wisata yang berakar pada budaya setempat, termasuk hubungan antara pendampingan eksternal, pembelajaran antarteman sebaya, partisipasi praktis, dan musyawarah adat. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan dua pertanyaan: (1) melalui proses pembelajaran apa Pokdarwis mendukung pemberdayaan masyarakat di SARUGO; dan (2) kondisi apa yang mendukung atau menghambat proses tersebut? Artikel ini menyajikan kajian kasus tentang Pokdarwis sebagai agen pendidikan nonformal serta implikasinya bagi praktik pendidikan masyarakat di desa wisata.

2. Metode

2.1. Desain dan lokasi penelitian

Penelitian ini menggunakan desain studi kasus kualitatif untuk mengkaji proses pembelajaran yang berkaitan dengan Pokdarwis di SARUGO. Desain studi kasus dipilih karena penelitian berfokus pada suatu lingkungan masyarakat yang terbatas serta makna dan interaksi yang membentuk kegiatan pariwisata (Fadli, 2021). Penelitian lapangan dilaksanakan di Jorong Sungai Dadok, Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, pada Agustus 2025.

Fokus analitis pada proses pendidikan nonformal yang terkandung dalam data tentang pembentukan dan kegiatan Pokdarwis. Unit analisisnya adalah episode dan interaksi yang berkaitan dengan proses belajar: pendampingan, diskusi dan perencanaan anggota, pembagian peran, penerapan keterampilan dalam pelayanan wisata, serta keterlibatan pemimpin adat. Fokus tersebut membedakan artikel ini dari pembahasan yang menilai pengembangan potensi destinasi; artikel ini tidak mengukur capaian belajar, perubahan pendapatan, atau dampak pariwisata.

2.2. Partisipan dan teknik pemilihan informan

Informan dipilih secara purposif berdasarkan pengetahuan mereka tentang pembentukan dan kegiatan desa wisata. Penelitian ini melibatkan sebelas informan, yaitu seorang wali nagari, seorang wali jorong, ketua Pokdarwis, dua anggota Pokdarwis, seorang alim ulama, seorang ninik mamak, seorang cerdik pandai, seorang perwakilan pemuda, dan dua pelaku usaha pariwisata. Komposisi tersebut memungkinkan perbandingan perspektif kelembagaan, pemerintahan, adat, agama, kepemudaan, dan mata pencaharian. Catatan partisipan yang tersedia tidak memuat profil demografis secara lengkap; karena itu, usia, jenis kelamin, dan latar belakang pendidikan tidak disimpulkan.

Tabel 1. Kelompok informan dan kode wawancara

Kelompok informan	Jumlah	Kode
Wali nagari	1	KN
Wali jorong	1	WJ
Ketua Pokdarwis	1	KP
Anggota Pokdarwis	2	AP1, AP2
Alim ulama	1	AU

© 2026 The Author(s)
This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
ISSN: 2549-7774

Ninik mamak	1	NM
Cerdik pandai	1	CP
Tokoh pemuda	1	TP
Pelaku usaha desa wisata	2	PDW1, PDW2
Jumlah	11	

2.3. Pengumpulan data

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen. Wawancara mencakup keterangan tentang pembentukan Pokdarwis, pendampingan eksternal, diskusi pemuda, pembagian tanggung jawab organisasi, penyusunan paket wisata, serta peran pemimpin adat. Observasi dan dokumentasi digunakan untuk memberi konteks pada keterangan wawancara serta menelaah kegiatan masyarakat dan bahan pendukung.

Informan dipilih secara *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai pembentukan Pokdarwis, pengelolaan kegiatan wisata, serta kehidupan adat di Jorong Sungai Dadok. Penggunaan rujukan jaringan sosial informan awal untuk menemukan pihak lain yang berpotensi memberikan informasi. Dengan demikian, pemilihan informan menggabungkan pertimbangan relevansi pengalaman dengan penelusuran aktor yang memahami fenomena penelitian.

Wawancara diarahkan pada asal-usul pembentukan kelompok, peran perguruan tinggi dan pemuda, penataan bidang kerja, penyusunan paket wisata, serta keterlibatan pemimpin adat dan agama. Catatan wawancara diberi kode menurut jenis informan dan tanggal, misalnya KP, TP, AP1, AP2, NM, AU, dan CP. Observasi partisipatif digunakan untuk memahami kegiatan dan interaksi masyarakat dalam konteksnya; dokumen, foto, dan benda yang relevan berfungsi sebagai data pendukung. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama bersama anggota tim penelitian, sebagaimana dinyatakan dalam artikel.

2.4. Analisis data dan keabsahan temuan

Data dianalisis secara iteratif melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, mengikuti model analisis kualitatif interaktif yang dirujuk dalam (Rijali, 2019). Pertama, transkrip wawancara, catatan observasi, dokumen, dan bahan pendukung ditata agar keterangannya dapat ditelusuri berdasarkan sumber dan konteks. Kedua, reduksi dilakukan dengan memusatkan perhatian pada informasi yang menjawab fokus artikel, yaitu pembentukan Pokdarwis, pendampingan, interaksi belajar antaranggota, pembagian peran, praktik pelayanan wisata, dan musyawarah adat. Dalam pembacaan untuk artikel ini, unit informasi kemudian dikelompokkan ke dalam tiga fungsi pendidikan: fasilitasi eksternal, diskusi/perencanaan sebaya, dan pembelajaran melalui praktik.

Ketiga, data yang telah dipilih disajikan secara tematik dengan menghubungkan keterangan informan, konteks hasil observasi, dan dokumen yang tersedia. Keempat, penarikan kesimpulan dilakukan dengan membandingkan pola antarkelompok informan dan meninjau kembali kecocokan interpretasi terhadap bukti yang mendasarinya. Triangulasi sumber membandingkan keterangan informan kunci dan informan pendukung; triangulasi metode membandingkan wawancara dengan observasi partisipatif dan dokumentasi. Langkah ini membantu menguji konsistensi temuan, tetapi tidak menggantikan konfirmasi partisipan atau pengukuran hasil belajar yang memang tidak dilaporkan dalam sumber data.

© 2026 The Author(s)
This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
ISSN: 2549-7774



Gambar 1. Alur analisis data berdasarkan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil

3.1.1. Pembentukan Pokdarwis sebagai proses pembelajaran dengan pendampingan

Pembentukan Pokdarwis pada 2019 melibatkan interaksi antara pemuda setempat dan pihak perguruan tinggi. Partisipan menyebut dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, mahasiswa yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, pemuda setempat, serta pemimpin nagari dan adat sebagai pihak yang berkontribusi dalam proses tersebut. Dalam waktu sekitar 40 hari, kelompok ini dibentuk menjadi organisasi formal yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, serta koordinator bidang pondok wisata, kesenian, agrowisata, pemanduan, ekonomi kreatif, media, dan kuliner. Proses tersebut memadukan pendampingan dari luar dengan pengetahuan lokal mengenai keterampilan dan peran yang telah dimiliki masyarakat.

Keterangan ketua Pokdarwis menunjukkan bahwa gagasan desa wisata beredar di lingkungan masyarakat sebelum organisasi dibentuk. Pertemuan dengan dosen dan pimpinan bidang pariwisata di perguruan tinggi kemudian mempertemukan gagasan tersebut dengan prakarsa pemuda serta dukungan pemerintah nagari dan pemimpin adat. Dengan demikian, pembentukan kelompok tidak dapat dijelaskan hanya sebagai program yang datang dari luar: pendampingan eksternal menjadi pemantik, sementara pengorganisasian dan pengenalan potensi bertumpu pada aktor serta sumber daya lokal (W/KP/05/08/2025).

Seorang anggota Pokdarwis menjelaskan bahwa mitra perguruan tinggi memberikan arahan umum tentang desa wisata dan membantu membentuk kelompok sebelum mahasiswa meninggalkan lokasi. Anggota kemudian ditempatkan pada bidang yang sesuai dengan pengalaman dan minat mereka. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan kelompok bukan sekadar langkah organisatoris. Proses tersebut juga menjadi lingkungan pembelajaran awal bagi anggota untuk mengenal gagasan desa wisata, membahas potensi lokal, dan mulai mengubah potensi itu menjadi kegiatan yang dapat dilaksanakan.

Pola tersebut juga terlihat dalam cara anggota ditempatkan pada bidang kerja. Hasil penelitian menyebut bahwa kesenian dan kegiatan ekonomi kreatif telah dikenal dalam kehidupan masyarakat sebelum Pokdarwis dibentuk. Anggota tidak memulai dari ruang kosong; organisasi memberi bentuk dan tanggung jawab baru pada keterampilan serta pengalaman yang telah ada. Seorang anggota menyatakan, “seksi kesenian itu dari nenek kami sudah ada,” lalu menjelaskan bahwa mitra perguruan tinggi tetap memberikan pelatihan umum tentang desa wisata (W/AP1/06/08/2025). Kutipan ini menunjukkan pertemuan antara pengetahuan yang diwariskan dengan pengetahuan baru mengenai pengelolaan destinasi.

3.1.2. Diskusi antarteman sebaya dan perencanaan kolektif

Anggota pemuda menceritakan bahwa mereka kerap berkumpul di lapau (warung kopi) untuk membicarakan kegiatan masyarakat dan rencana menyambut pengunjung. Pembahasan mencakup penyusunan paket wisata dan penyiapan pertunjukan budaya, seperti tari gelombang, talempong, dan musik bambu. Walaupun berlangsung di

© 2026 The Author(s)
This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
ISSN: 2549-7774

ruang informal, diskusi tersebut memiliki tujuan yang jelas: peserta bertukar informasi, mengoordinasikan peran, dan membahas cara memperkenalkan potensi lokal kepada pengunjung. Temuan ini menunjukkan bahwa ruang sosial yang akrab dapat mendukung pembelajaran masyarakat ketika kebiasaan berkumpul dihubungkan dengan tugas kolektif.

Seorang tokoh pemuda menggambarkan kebiasaan berkumpul tersebut sebagai kegiatan yang berlangsung hampir setiap malam. Di lapau, pemuda membahas kegiatan yang akan dilakukan, termasuk cara menyambut rombongan dan paket yang akan disiapkan; ia menyebut tari gelombang, talempong, dan musik bambu sebagai bagian dari penyambutan (W/TP/06/08/2025). Rutinitas ini memperlihatkan bahwa pembelajaran tidak hanya terjadi pada saat pendamping hadir. Interaksi sebaya menyediakan ruang untuk menyampaikan informasi, menyepakati langkah, dan menyesuaikan rencana dengan kebutuhan pengunjung.

Setelah unit organisasi terbentuk, para koordinator membahas program kerja masing-masing. Sebagai contoh, koordinator agrowisata mempertimbangkan kebun jeruk yang dapat digunakan untuk kegiatan memetik buah dan cara pengelolaannya. Koordinator lainnya menyiapkan kegiatan terkait pondok wisata, pemanduan, kesenian lokal, media, dan kuliner. Dengan demikian, proses pembelajaran tersebar di antara anggota kelompok dan tidak hanya berlangsung dalam satu kegiatan pelatihan.

Pembagian tugas memberi arah pada diskusi tersebut. Hasil penelitian mencatat koordinator pondok wisata, kesenian, agrowisata, pemanduan, ekonomi kreatif, media, dan kuliner. Setiap bidang menyiapkan program atau paket untuk kunjungan. Contohnya, koordinator agrowisata membahas kebun jeruk yang dapat dipakai untuk kegiatan memetik buah, termasuk cara mengelola kebun dan sistem pembayaran. Keterangan ketua Pokdarwis juga menyebut persiapan video profil oleh bidang humas/media untuk kegiatan promosi dan perlombaan. Bukti ini menggambarkan bagaimana pembagian peran memunculkan kebutuhan belajar yang berbeda sesuai bidang kerja.

3.1.3. Pembelajaran melalui praktik kegiatan pariwisata

Pembelajaran masyarakat juga berlangsung dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan bagi pengunjung. Partisipan menceritakan pengembangan pengalaman wisata yang mencakup kesenian lokal, daya tarik alam, kegiatan memetik jeruk, kunjungan ke sungai dan air terjun, penjelajahan gua, serta penjelasan mengenai adat dan sejarah setempat. Anggota menerapkan pengetahuan dengan menyusun paket wisata, menerima tamu, memandu pengunjung, dan mengoordinasikan layanan. Dengan cara ini, kegiatan pariwisata menjadi konteks praktis untuk belajar dan menguji gagasan kelompok.

Paket kegiatan yang dipersiapkan menggabungkan sumber daya alam dan budaya. Selain pertunjukan seni, pengunjung dapat diperkenalkan pada air terjun, sungai, susur gua, wisata petik jeruk, serta makna dan sejarah adat. Dalam pelaksanaannya, anggota perlu menyusun urutan kegiatan, menerima tamu, memandu, mengoordinasikan layanan, dan menjelaskan sumber daya lokal. Tugas-tugas tersebut merupakan situasi praktik yang membuka peluang untuk menerapkan pengetahuan; data yang ada tidak menunjukkan apakah seluruh tugas dilakukan oleh setiap anggota atau apakah keterampilannya dinilai dengan instrumen tertentu.

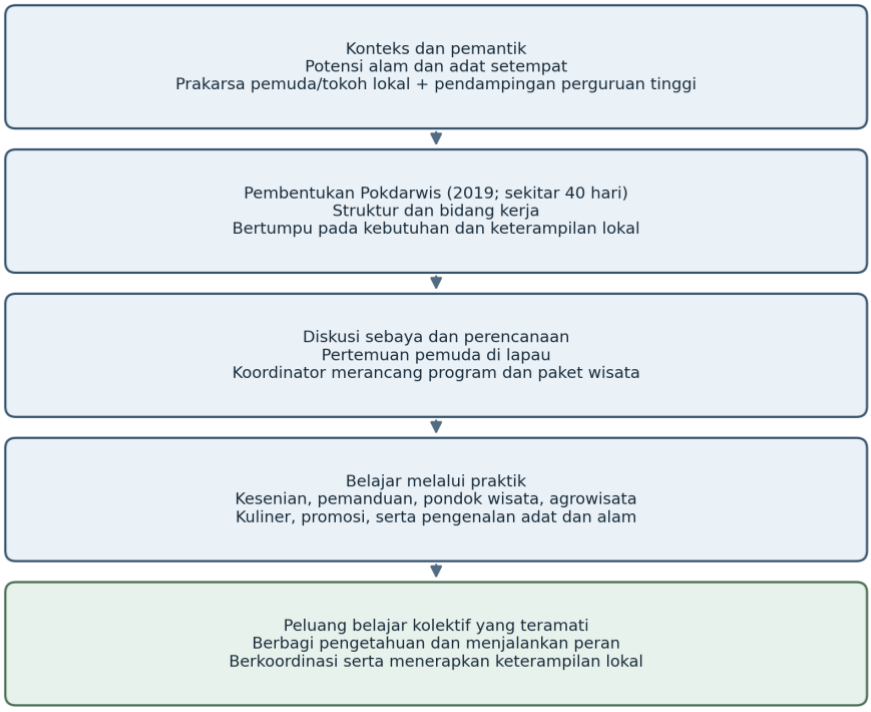
3.1.4. Kepemimpinan adat dan kondisi bagi pembelajaran yang inklusif

Pemimpin adat dan agama menyumbangkan pengetahuan tentang aturan lokal, tradisi, dan musyawarah masyarakat. Partisipan menjelaskan adanya pertemuan adat dan keterlibatan ninik mamak, alim ulama, serta cerdik pandai dalam keputusan mengenai pembangunan nagari dan praktik budaya. Pengetahuan tersebut memengaruhi hal-hal yang dapat diperkenalkan kepada pengunjung serta cara kegiatan pariwisata menghormati norma setempat. Dengan demikian, pengetahuan budaya berfungsi sebagai sumber belajar sekaligus pedoman bagi praktik pariwisata yang bertanggung jawab.

Keterangan informan menunjukkan bahwa forum adat menjadi tempat penting untuk membicarakan keputusan kolektif. Hasil penelitian menyebut peran ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai dalam memberikan arahan, serta pertemuan berkala di balai adat. Aturan bagi pengunjung juga dikaitkan dengan norma agama dan adat, termasuk kesopanan, etika, dan larangan merusak lingkungan. Dalam konteks ini, pendidikan masyarakat mencakup proses memahami norma dan kewenangan lokal, bukan hanya menguasai keterampilan pelayanan wisata.

© 2026 The Author(s)
This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
ISSN: 2549-7774

Namun, keterlibatan tokoh adat tidak selalu berlangsung tanpa ketegangan. Hasil penelitian mencatat harapan sebagian ninik mamak agar keputusan dibicarakan melalui forum musyawarah dan tidak mendahului kewenangan mereka. Ungkapan "pantang didului" menggambarkan pentingnya pengakuan terhadap tata konsultasi setempat (W/NM/06/08/2025). Keterangan ini perlu dipahami sebagai isu prosedur dan legitimasi partisipasi, bukan sebagai penilaian umum atas kelompok adat. Bagi pengelolaan Pokdarwis, temuannya menegaskan bahwa koordinasi yang membuka ruang bicara sejak awal merupakan bagian dari proses pemberdayaan.



Gambar 2. Rangkaian proses belajar dan pengorganisasian yang teridentifikasi dalam kasus SARUGO.

3.2. Pembahasan

Temuan menunjukkan tiga fungsi pendidikan Pokdarwis yang saling berkaitan di SARUGO, yaitu menghubungkan masyarakat dengan pendampingan eksternal, menyelenggarakan diskusi dan perencanaan antarteman sebaya, serta membuka kesempatan belajar melalui partisipasi praktis. Fungsi-fungsi ini menempatkan Pokdarwis sebagai perantara pembelajaran, bukan semata-mata sebagai badan promosi pariwisata. Penafsiran ini sejalan dengan penelitian pendidikan masyarakat yang memandang pendampingan, penguatan kelembagaan, dan pembelajaran partisipatif sebagai landasan bagi kapasitas lokal dan kemandirian desa (Fandika, 2025)

Ketiga fungsi tersebut saling berhubungan dan tidak selalu berlangsung dalam urutan yang kaku. Pendampingan awal membantu membangun struktur, tetapi kegiatan belajar berlanjut melalui pertemuan pemuda, kerja koordinator, dan pengalaman melayani pengunjung. Karena itu, Pokdarwis dapat dipahami sebagai perantara pembelajaran yang menghubungkan aktor, pengetahuan, dan kesempatan praktik. Bukti ini mendukung penafsiran tentang proses pendidikan nonformal, bukan klaim bahwa Pokdarwis telah memiliki kurikulum atau sistem pelatihan formal.

Pertama, pendampingan eksternal membantu memperkenalkan gagasan organisasi dan menerjemahkannya ke dalam struktur lokal. Namun, proses tersebut tidak menggantikan prakarsa masyarakat. Kelompok terbentuk melalui interaksi antara dukungan perguruan tinggi, partisipasi pemuda, dan kepemimpinan lokal. Keseimbangan ini sejalan dengan pendekatan kolaboratif dalam pengembangan desa wisata, ketika lembaga pendidikan dan pendamping dapat menyumbangkan sumber daya, sementara masyarakat tetap berperan utama dalam menentukan

© 2026 The Author(s)
This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
ISSN: 2549-7774

prioritas (Andriani, 2021). Kasus ini juga menunjukkan bahwa pendampingan eksternal perlu meninggalkan pengetahuan yang dapat diakses dan peran lokal yang berjalan, bukan ketergantungan sementara pada pihak luar.

Pendampingan di SARUGO tampak sebagai dukungan awal yang bertemu dengan kepemimpinan lokal. Kehadiran dosen dan mahasiswa KKN membantu memperkenalkan gagasan desa wisata dan mempercepat pembentukan organisasi; sesudahnya, warga mengisi bidang-bidang kerja berdasarkan kebutuhan serta pengalaman setempat. Pola ini penting bagi pendidikan masyarakat karena sumber belajar eksternal dapat memperluas wawasan, sementara keberlanjutan pembelajaran bergantung pada kemampuan kelompok mengelola pengetahuan itu secara mandiri. Implikasi praktisnya ialah pendampingan perlu memfasilitasi proses bersama, mendokumentasikan pengetahuan, dan memberi ruang bagi warga menentukan prioritas.

Kedua, pertemuan informal di lapau menjadi ruang sehari-hari untuk berdiskusi dan berkoordinasi. Interaksi tersebut sejalan dengan pembelajaran berbasis masyarakat: pengetahuan berkembang melalui keterlibatan dalam kegiatan bersama, pertukaran pengalaman antarteman sebaya, dan pembahasan masalah lokal. Penelitian tentang komunikasi Pokdarwis juga menunjukkan bahwa anggota kelompok mempelajari dan menerapkan praktik komunikasi melalui pengalaman serta kearifan lokal (Simanjuntak & Sunarja, 2023). Di SARUGO, diskusi tersebut tidak tercatat sebagai kurikulum formal. Nilai pendidikannya terletak pada kemampuannya membantu anggota merundingkan tugas, berbagi pengetahuan, dan menyiapkan tanggapan kolektif terhadap kebutuhan pengunjung.

Lapau berfungsi sebagai ruang sosial yang sudah dikenal pemuda, sehingga pembelajaran dapat melekat pada rutinitas dan persoalan nyata. Dalam pertemuan itu, pengetahuan tidak disampaikan satu arah; anggota mendiskusikan kunjungan, paket, seni penyambutan, serta tugas yang perlu disiapkan. Bentuk ini memberi peluang untuk belajar melalui percakapan dan negosiasi antarteman sebaya.

Ketiga, keterlibatan dalam praktik memberi kesempatan untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan. Penunjukan koordinator pada bidang pariwisata memungkinkan anggota menghubungkan keterampilan dan minat dengan tanggung jawab tertentu. Hal ini penting karena pemberdayaan memerlukan kesempatan untuk menggunakan daya bertindak, bukan sekadar menerima informasi. Penelitian tentang desa wisata mengidentifikasi partisipasi lokal, kapasitas kelembagaan, dan kesempatan mengelola potensi setempat sebagai dimensi penting pemberdayaan (Achmad, 2023). Kasus SARUGO menambahkan penafsiran dari sudut pendidikan: partisipasi dapat menjadi ruang belajar ketika anggota memiliki peran yang bermakna, terlibat dalam perencanaan bersama, dan memperoleh umpan balik.

Perancangan kebun jeruk dan materi promosi memperlihatkan bahwa praktik mengandung persoalan yang perlu dipecahkan: memilih lokasi, mengatur layanan, menentukan mekanisme pembayaran, dan menyusun cara memperkenalkan destinasi. Persoalan tersebut menghubungkan pembelajaran dengan tanggung jawab organisasi. Kegiatan seni, pemanduan, pondok wisata, dan kuliner juga menuntut koordinasi antar bidang. Data mendukung pemaknaan bahwa anggota memperoleh kesempatan menerapkan keterampilan lokal dalam situasi kerja wisata, cukup untuk menyatakan adanya peningkatan kompetensi yang terukur.

Temuan juga menunjukkan bahwa budaya lokal merupakan isi sekaligus konteks pembelajaran. Pengetahuan tentang adat Minangkabau, kesenian, dan aturan masyarakat membentuk kegiatan pariwisata serta membantu anggota memperkenalkan identitas lokal. Pengembangan kapasitas masyarakat yang berlandaskan kearifan lokal juga dikaitkan dengan peningkatan partisipasi dan pengelolaan wisata budaya (Wahyuhana, 2021). Hal ini tidak berarti bahwa setiap tradisi harus dijadikan produk wisata. Sebaliknya, pengetahuan budaya perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan hal yang dapat dibagikan, pihak yang berwenang menafsirkannya, serta pembagian manfaat dan tanggung jawab.

Kearifan lokal juga menentukan materi dan batas pembelajaran. Tari gelombang, talempong, musik bambu, rumah gadang, serta cerita adat dipersiapkan sebagai bagian dari pengalaman wisata. Namun, pemaknaan tradisi tidak cukup diserahkan kepada pengelola paket wisata saja karena sebagian pengetahuan dan kewenangan berada pada pemimpin adat dan tokoh agama. Pelibatan mereka sejak penyusunan kegiatan dapat membantu anggota memahami konteks, tata cara, dan batas-batas yang perlu dihormati. Dengan demikian, budaya berfungsi sebagai sumber belajar sekaligus landasan etis bagi interaksi dengan pengunjung.

Ketegangan koordinasi dengan pemimpin adat karena itu merupakan persoalan pendidikan sekaligus organisatoris. Jika pemangku pengetahuan adat hanya dilibatkan setelah keputusan dibuat, proses tersebut berisiko menempatkan mereka sekadar sebagai sumber informasi budaya, bukan sebagai pendidik bersama dan pengambil

© 2026 The Author(s)
This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
ISSN: 2549-7774

keputusan. Pendidikan masyarakat yang partisipatif perlu membuka dialog antara pemuda, Pokdarwis, lembaga adat, pemerintah setempat, dan pendamping eksternal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menekankan bahwa pemberdayaan masyarakat bergantung pada partisipasi dan kewenangan lokal serta bahwa kolaborasi dapat melemah ketika pengambilan keputusan berlangsung secara tidak merata (Dolezal & Novelli, 2022).

Keterangan mengenai "pantang didului" memperlihatkan bahwa partisipasi juga menyangkut cara keputusan dibuat. Jika pemuda dan Pokdarwis mengembangkan kegiatan tanpa prosedur konsultasi yang dipandang sah oleh pemangku adat, pengetahuan dapat bertambah tetapi kepercayaan antarkelompok justru melemah. Forum musyawarah dapat berperan sebagai ruang belajar lintas generasi: pemuda menyampaikan gagasan program, sementara pemimpin adat menjelaskan pertimbangan sosial dan budaya.

Berbeda dari penelitian yang terutama menggambarkan Pokdarwis sebagai lembaga pengelola atau komunikasi pariwisata, analisis ini menyoroti cara pembelajaran diselenggarakan melalui pendampingan, pertukaran pengalaman antarteman sebaya, dan praktik. Kontribusi kajian ini memiliki batasan: temuan tidak membuktikan peningkatan hasil belajar atau dampak sebab-akibat terhadap pendapatan, jumlah pengunjung, maupun keberlanjutan jangka panjang. Temuan mengidentifikasi proses yang memungkinkan organisasi masyarakat menciptakan kesempatan belajar serta kondisi yang diperlukan agar kesempatan tersebut mendukung pemberdayaan.

3.3. Implikasi

Dalam praktik pendidikan nonformal, program desa wisata perlu memandang Pokdarwis sebagai lembaga pembelajaran yang potensial. Dukungan dapat memadukan pelatihan singkat sesuai kebutuhan, pendampingan, diskusi antarteman sebaya, penugasan praktis, dan refleksi atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Perencanaan pembelajaran sebaiknya diawali dengan pemetaan pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki masyarakat, lalu menghubungkannya dengan peran tertentu dalam pengelolaan pariwisata. Mitra eksternal perlu mendokumentasikan bahan pembelajaran dan secara bertahap memperkuat kemampuan kelompok untuk merencanakan serta meninjau kegiatannya sendiri.

Dalam tata kelola masyarakat, pemimpin adat, pemuda, pemerintah setempat, pelaku usaha pariwisata, dan Pokdarwis perlu dilibatkan dalam musyawarah sebelum paket wisata ditetapkan. Langkah ini dapat menjaga kewenangan budaya sekaligus memperluas partisipasi dalam pengambilan keputusan. Penelitian berikutnya dapat mengkaji perbedaan proses pembelajaran berdasarkan usia, jenis kelamin, peran, dan akses terhadap mata pencaharian pariwisata, serta mengikuti perubahan pengetahuan dan partisipasi dari waktu ke waktu.

3.4. Keterbatasan

Penelitian ini terbatas pada satu desa wisata dan data kualitatif yang dikumpulkan pada 2025 sehingga temuannya tidak dapat digeneralisasikan kepada seluruh Pokdarwis atau desa wisata. Penelitian ini mencakup satu kasus dan satu periode kerja lapangan serta tidak mengukur perubahan pengetahuan atau pemberdayaan partisipan dari waktu ke waktu. Uraian tentang isi pelatihan dan hasil pembelajaran juga terbatas. Karena itu, temuan menjelaskan proses dalam konteks tertentu, bukan mengukur dampak sebab-akibat atau mewakili seluruh desa wisata.

4. Simpulan

Pokdarwis mendukung pemberdayaan masyarakat melalui kesempatan belajar yang terintegrasi dalam pembentukan kelompok, pendampingan eksternal, diskusi antarteman sebaya, perencanaan kolektif, dan praktik kegiatan pariwisata. Peran pendidikannya bersifat relasional dan berbasis praktik: anggota menghubungkan pengetahuan serta keterampilan lokal dengan tanggung jawab bersama, sementara mitra eksternal membantu memulai pembelajaran organisasi. Pada saat yang sama, proses tersebut memerlukan musyawarah yang lebih inklusif dengan pemimpin adat dan kelompok masyarakat lainnya. Kasus ini menunjukkan bahwa pendidikan nonformal dapat memperkuat pengembangan desa wisata apabila bertumpu pada pengetahuan lokal, memberi warga kesempatan praktik yang bermakna, dan mendukung keterlibatan mereka dalam keputusan mengenai sumber daya masyarakat.

© 2026 The Author(s)
This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
ISSN: 2549-7774

Kontribusi Penulis

Muhamad Fahrur Rozi berkontribusi dalam konseptualisasi penelitian, perumusan metodologi, pengumpulan dan kurasi data, analisis formal, serta penulisan draf awal. **Prehaning Yuni Astuti** berkontribusi dalam supervisi penelitian, validasi temuan, dan peninjauan serta penyuntingan naskah. **Achmad Baidhowi** berkontribusi dalam pengumpulan dan kurasi data, penyediaan sumber daya penelitian, serta peninjauan dan penyuntingan naskah. **Zulkarnain** berkontribusi dalam validasi, analisis data, penyusunan visualisasi, serta peninjauan dan penyuntingan naskah. Seluruh penulis membaca dan menyetujui versi akhir naskah.

Pendanaan

Tidak ada dukungan pendanaan yang diterima.

Deklarasi Konflik Kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepenulisan,dan/atau publikasi artikel ini.

Ketersediaan Data

Data yang dihasilkan dan/atau dianalisis dalam penelitian ini tersedia dan dapat diperoleh dengan menghubungi penulis korespondensi berdasarkan permintaan yang wajar.

Pernyataan Penggunaan Kecerdasan Artifisial

Perangkat berbantuan kecerdasan artifisial digunakan untuk membantu membuat bagan alur Rangkaian proses belajar dan pengorganisasian yang teridentifikasi dalam kasus SARUGO.

Ucapan Terima Kasih

Penulis dapat menyampaikan terima kasih kepada masyarakat SARUGO, anggota Pokdarwis, pemimpin setempat, dan mitra perguruan tinggi setelah nama pihak yang akan disebutkan dikonfirmasi dan izin yang diperlukan diperoleh.

Daftar Pustaka

Achmad, W., Chuang, H. M., Gunawan, U. P., Nadila, D., & Maulana, I. (2023). Community empowerment through the development of the Cisaat Tourism Village, Subang Regency. *Ilomata International Journal of Social Science*, *4*(1), 30–39.

Andriani, R. A., Wibowo, A., & Winarno, J. (2021). Institutional strengthening model for Samiran Boyolali Tourist Village (Dewi Sambi) in Central Java, Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *637*(1), 12096. https://doi.org/10.1088/1755-1315/637/1/012096

Dolezal, C., & Novelli, M. (2022). Power in community-based tourism: Empowerment and partnership in Bali. *Journal of Sustainable Tourism*, *30*(10), 2352–2370.

Dushkova, D., & Ivlieva, O. (2024). Empowering Communities to Act for a Change: A Review of the Community Empowerment Programs towards Sustainability and Resilience. *Sustainability*, *16*(19), 8700. https://doi.org/10.3390/su16198700

Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, *21*(1), 33–54. https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075

Fandika, I., Hermawan, Y., & Leonia, R. A. (2025). Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dalam upaya peningkatan sumber daya manusia di Desa Kuala Tanjung. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, *20*(2), 21–30. https://doi.org/10.17977/um041v20i22025p21-30

Hariyadi, B. R., Rokhman, A., Rosyadi, S., Yamin, M., & Runtiko, A. G. (2024). The role of community-based tourism in sustainable tourism village in Indonesia. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, *18*(7), e05466. https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n7-038

Jannah, M., Riana, M. A., & Amaliah, A. N. S. (2022). The model of community empowerment participation in tourism village management to support sustainable economy in the post Covid-19 era. *Enrichment: Journal of Management*, *12*(5), 3345–3351. https://doi.org/10.35335/enrichment.v12i5.811

© 2026 The Author(s)
This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
ISSN: 2549-7774

Kurniawan, M. U., & Cahyono, A. E. (2020). The community empowerment program based on local potential through tourism village. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *485*(1), 12089. https://doi.org/10.1088/1755-1315/485/1/012089

Kurniawati, D. T., Pramono, S., Ayuni, R. F., & Adila, I. (2021). Community empowerment by strengthening the tourist village and education. *Erudio Journal of Educational Innovation*, *8*(1), 26–32.

Putrawan, P. E., & Ardana, D. M. J. (2019). Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan pariwisata di Desa Munduk Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng. *Locus*, *11*(2), 40–54.

Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, *17*(33), 81. https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374

Rozi, M. F., Putri, L. D., & Ulwan, N. (2023). The role of community empowerment-based Tourism Awareness Groups (Pokdarwis) in developing natural tourism potential in Seribu Gonjong Tourism Village. *KOLOKIUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, *11*(2), 318–327. https://doi.org/10.24036/kolokium.v11i2.650

Simanjuntak, D., & Sunarja, D. (2023). Organizational communication based on local wisdom by the Tourism Awareness Group in the management of Cireundeu Traditional Village. *Society*, *11*(2), 814–834. https://doi.org/10.33019/society.v11i2.575

Wahyuhana, R. T., Tisnawati, E., & Trimarstuti, J. (2021). Community capacity building based on local wisdom through the management of the Brontokusuman tourism village, Yogyakarta. *Community Empowerment*, *6*(12), 2257–2264. https://doi.org/10.31603/ce.5559

Wahyuni, R. B., Sumirat, W., Zulhelfa, & Handayaningrum, N. (2023). Interpersonal communication of Tourism Awareness Group in increasing the quality of tourism village products: A study from Petarangan Village, Temanggung. *Jurnal Kepariwisataan: Destinasi, Hospitalitas Dan Perjalanan*, *7*(1). https://doi.org/10.34013/jk.v7i1.1184

© 2026 The Author(s)
This is an Open Access article under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
ISSN: 2549-7774